

BAB I

PENDAHULUAN

1.9 Latar Belakang Masalah

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang didasari oleh kepentingan dari suatu negara. Kebijakan luar negeri memiliki fungsi penting untuk negara dalam berpolitik, dan fungsi yang paling umum adalah melindungi keamanan nasional, misalnya dengan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain.¹ Berbagai kepentingan dari suatu negara mengharuskan negara tersebut mencari jalan keluar semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu sendiri. Adakalanya dalam kebijakan luar negeri yang diambil, negara akan mengusahakan jalan keluar untuk kepentingan negaranya. Jika suatu negara sudah melangkah keluar negaranya maka akan terjadilah suatu komunikasi antar negara yang satu dan lainnya.²

Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tidak berpihak kepada siapapun sesuai dengan dasar negara pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945.³ Tujuan pokok politik luar negeri Indonesia salah satunya adalah perdamaian internasional. Dimana hanya dalam keadaan damai Indonesia dirasa mampu membangun dan memperoleh *national interest* yang dimiliki. Hal ini juga dipertegas oleh Presiden Soekarno dalam

¹ David P Fidler. 2009. *Health in Foreign Policy: An Analytical Overview*. Political Journal. Vol.15. No. 3. United Kingdom: Taylor & Francis Ltd. h.117

² T May Rudy. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama. h.13

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Vol.6*. Jakarta: Sartono Kartodirjo, M D Poesponegoro, N Notosusanto. h.322

penguraian Pancasila yang berkaitan dengan kolonialisme serta usaha untuk meredakan ketegangan perang dingin dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pidato “Membangun Dunia Kembali” di Sidang Umum PBB pada 30 September 1960.⁴ Untuk mencapai tujuan yang dimiliki, Indonesia menyebutkan dasar politiknya yang netral atau tidak berpihak dalam mengaitkan diri kepada negara atau kekuatan manapun dan mengambil jalan sendiri menghadapi masalah-masalah internasional dan tetap berusaha sekuat-kuatnya dalam pemeliharaan perdamaian serta meredam pertentangan yang terjadi di dunia, sebab itu politik luar negeri yang digunakan Indonesia dikatakan sebagai *politik bebas aktif*.⁵

Pola baru dalam benturan kekuatan internasional ialah tumbuhnya dua kekuatan besar di dunia, yang berdasarkan atas keunggulan dan kepentingan ideologi. Kelompok pertama ialah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang dikenal dengan nama “Blok Barat”. Kelompok kedua ialah dipelopori oleh Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, yang dikenal dengan nama “Blok Timur”.⁶ Dua blok dunia ini merupakan penentu dalam semua gerak internasional. Blok ini pula yang menentukan pola baru dari sistem internasional. Kini dikenal dengan dua pola atau bipolaris dari sistem internasional. Yaitu sistem yang dikendalikan dan mengacu ke blok barat atau Negara Amerika Serikat dan yang kedua blok timur ialah mengacu ke uni soviet dan negara-negara Eropa Timur.⁷

⁴ Sudharmono. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka : 1950-1964*. Jakarta : Tira Pustaka. h.173

⁵ Mohammad Hatta. 1953. *Dasar-dasar Politik Luar Negeri RI*. Jakarta: Tintamas. h.14

⁶ Djamal Djasmir. 1986. *Hubungan dan Lembaga Internasional*. Jakarta : Karunia. h.18

⁷ *Ibid*. h.104

Indonesia yang merupakan salah satu dari 5 negara pemrakarsa gerakan Non Blok menganggap perlu perdamaian dunia dijaga dan keamanan dunia diciptakan dengan memandang masalah kolonialisme yang dianggap sensitif bagi negara-negara Non Blok. Dari KTT Non Blok II hingga KTT Non Blok berikutnya masalah Palestina menjadi topik utama dan selalu mendapatkan perhatian yang serius bagi negara-negara yang ikut serta dalam konferensi ini.⁸ Perang Arab – Israel ini dipandang Indonesia sebagai kasus yang tidak sesuai dengan ideologi yang dimiliki Indonesia. Sejak tahun 1954 Israel yang merupakan orang-orang Yahudi Mesir sudah mulai melakukan peperangan terhadap negara-negara Arab sampai menghasilkan korban seperti Mesir kehilangan hampir 15.000 prajurit yang terbunuh, atau ratusan prajurit Yordania gugur, bahkan Israel sendiri kehilangan ribuan prajurit.⁹

Termasuk perang Suez tahun 1956 dimana pasukan pertahanan Israel (Israel Defence Force, disingkat IDF) melancarkan serangan. Meskipun kali ini tidak bisa dibuktikan pertanggung jawaban negara-negara Barat atas kekalahannya, Amerika Serikat dan Inggris dianggap sebagai dalang konspirasi kekuatan imperialis.¹⁰ Kemenangan Israel menimbulkan masalah serius yang baru dimana salah satunya adalah kebijakan yang harus diambil terhadap daerah yang ditaklukkan, dimana ada lebih dari satu juta orang Arab termasuk pengungsi harus dihadapi bahkan jalan untuk perundingan damai dengan negara-negara Arab yang dirasa masih

⁸ T May Rudy. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. h.89-90

⁹ Nino Oktorini. 2014. *Konflik Bersejarah –Enam Hari yang Mengguncang Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. h.140-141

¹⁰ *Ibid.* h.6

terlalu panjang untuk ditempuh karena negara-negara Arab bahkan mulai menghimpun kembali kekuatannya untuk membalas konflik bersenjata dengan Israel.¹¹

Di benua Asia sendiri, perkembangan olahraga dimulai ketika muncul kesadaran negara-negara Asia yang diprakasai oleh Guru Dutt Sondhi dari India untuk membentuk Asian Games Federation pada tanggal 13 Februari tahun 1949.¹² Perhelatan olahraga terbesar di Asia mulai diselenggarakan sejak tahun 1951 di New Delhi, India. Kemudian, di Tahun 1962, Indonesia juga berperan untuk membangun penyelenggaraan Asian Games ke IV pada tanggal 24 Agustus hingga 3 September 1962.¹³ Hal ini membawa Indonesia menjadikan olahraga sebagai tempat untuk menggunakan alat perlawanan dalam menyampaikan protes terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak sejalan bagi setiap negara. Event olahraga seperti Asian Games dijadikan Indonesia sebagai sarana untuk mengaplikasikan politik luar negeri yang dimiliki dan sarana sebagai bentuk penentangan terhadap hegemoni barat serta dapat dijadikan ajang pembuktian kemampuan suatu negara dalam mempertahankan ideologi.¹⁴

Interaksi dunia dalam olahraga juga dapat dijadikan alat perlawanan suatu negara dalam menyampaikan protes terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai ataupun tidak sejalan bagi setiap negara yang memiliki tujuan sama, Indonesia melihat kesempatan ini yang kemudian melakukan pembuktian kemampuannya

¹¹ Nino Oktorini. *Konflik Bersejarah –Enam Hari yang Mengguncang Dunia*. h.143

¹² History OCA diakses [online] <http://www.ocasia.org/AboutUs/Index> pada: 8 Agustus 2018.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudharmono. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka : 1950-1964*. Jakarta : Tira Pustaka. h.217

dengan mengambil sebuah kebijakan.¹⁵ Bukti konkritnya ketika Indonesia yang menjadi salah satu Gerakan Non Blok (GNB) menunjukkan ketidak berpihakannya terhadap Blok Timur dengan menjadi inisiator olimpiade tandingan atau yang disebut dengan GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan melakukan respon politik di Asian Games Federation pada tahun 1962.¹⁶

1.10 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat atas ketertarikan penulis berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah: Mengapa Indonesia mengambil kebijakan luar negeri sebagai respon terhadap isu Israel-Palestina dalam ajang olahraga Asian Games 1962 ?

1.11 Tujuan Penelitian

Peneliti mencoba mengamati dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh Indonesia pada dunia Internasional khususnya Asia Games 1962 dimana Israel tidak bisa berpartisipasi serta pembekuan sementara status keanggotaan Indonesia di Organisasi OCA pada saat itu. Dengan landasan ideologi yang dimiliki Indonesia peneliti berusaha menjelaskan alasan Indonesia menjadikan ajang olahraga Asian Games 1962 sebagai sarana implementasi kebijakan politik untuk Israel terhadap peperangan yang sedang dialami Israel dengan negara-negara Arab.

¹⁵ *Ibid.* h.218

¹⁶ *Ibid.* h.237

1.12 Manfaat Penelitian

1.12.1 Secara Teoritis

Memberikan materi tentang penerapan ilmu hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan intervensi kemanusiaan dimana Asian Games dijadikan sebagai wadah penunjang pengaplikasian kebijakan yang digunakan oleh negara-negara terutama Indonesia yang kemudian dipilih sebagai sarana penyampaian kepentingan nasional dalam menciptakan kestabilan kawasan global dan menjalin hubungan kerjasama terutama dalam tujuan perdamaian dunia.

1.12.2 Secara Praktis

Sebagai sarana untuk membangun kembali pemahaman konsep dan teori-teori Hubungan Internasional yang dipelajari oleh penulis dan melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam menganalisis suatu fenomena menggunakan metode-metode ilmiah, dengan membandingkan relevansi teori dan realita yang terjadi. Penulisan penelitian ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program studi S1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Hubungan Internasional (HI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

1.13 Kerangka Pemikiran

1.13.1 Peringkat Analisis

Peringkat analisis dalam sebuah penelitian Ilmu Hubungan Internasional menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai penjelasan terhadap perilaku

dan interaksi dalam aktivitas internasional.¹⁷ Dalam menentukan peringkat analisis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah menentukan unit analisis penelitian kita yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan yang disebut juga dengan variabel independen. Kedua adalah menentukan unit ekplanasi, yaitu dampak terhadap unit analisis yang hendak diteliti yang disebut juga dengan variabel independen. Dengan kata lain, unit analisis dipengaruhi oleh unit eksplanasi.¹⁸

David Singer menyebutkan ada lima peringkat analisis yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional.¹⁹ Pertama adalah level analisis individu yang mana melihat fenomena hubungan internasional sebagai perilaku dari individu-individu. Pada level analisis ini, peneliti harus mengkaji sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat kebijakan seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah level analisis kelompok individu yang diasumsikan bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional secara komunal. Peristiwa internasional sebenarnya ditentukan oleh sekelompok individu seperti birokrasi dalam suatu pemerintahan ataupun suatu kelompok kepentingan tertentu. Ketiga adalah level analisis negara-bangsa. Level ini lebih menekankan pada perilaku negara-bangsa sebagai aktor

¹⁷ Mohtar Masoed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. h.35

¹⁸ *Ibid.* h.38

¹⁹ J David Singer. 1961. *The Level of Analysing Problem in International Relations*. Klaus knorr and Sidney Verba(ed), *The International System: Theoretical essays*. Princeton: Princeton University Press. h.40-42

dalam hubungan internasional. Pada level ini, analisis para peneliti ditekankan pada perilaku negara-bangsa seperti pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri karena hubungan internasional memang didominasi oleh aktor negara-bangsa.

Keempat adalah level analisis kelompok negara-bangsa. Level analisis ini memiliki anggapan jika pola interaksi yang ada dalam hubungan internasional merupakan bentukan dari kelompok negara-bangsa seperti contohnya adalah aliansi, blok-blok ideologi dan lainnya. Dan yang kelima adalah level analisis sistem internasional yang memandang bahwa penyebab terjadinya hubungan antar aktor-aktor internasional adalah sistem internasional.²⁰ Penelitian ini menggunakan level analisis kelompok negara-bangsa karena penelitian ini menjelaskan tentang peran negara Indonesia dalam dunia internasional untuk menangani suatu konflik negara Israel-Arab terhadap kebijakan atau politik luar negeri yang diambil.

1.13.2 Landasan Teori

1.13.2.1 National Interest

Frederich S Pearson dan J Martin Rochester menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan (goals) yang ingin dicapai oleh semua negara, salah satunya adalah perdamaian atas masalah- masalah (isu) tertentu. Tanpa terkecuali semua negara memiliki kepentingan dibalik kebijakan luar negeri yang diambil. Dengan merujuk pada kepentingan nasional, para pemimpin nasional (presiden) berusaha untuk memaksimalkan keuntungan

²⁰*Ibid.* h.42

yang didapat negaranya dalam hubungannya dengan negara lain.²¹ Perilaku politik luar negeri yakni berbagai tindakan yang dilakukan negara terhadap negara lain dan sebaliknya, sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum faktor yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri adalah faktor internasional dan faktor individu pembuat keputusan.²² Kepentingan nasional sangat mempengaruhi perilaku politik luar negeri dimana tindakan yang dilakukan memiliki faktor penunjang yang berkaitan seperti faktor internasional melalui interaksi internasional yang nantinya akan dijadikan perumusan kebijakan oleh pembuat keputusan (*decision maker*).²³

Dalam kasus kebijakan yang diambil Indonesia pada Asian Games 1962 dimana Presiden Soekarno telah menolak pengeluaran visa bagi kontingen Atlet Israel.²⁴ Dalam pertemuan ini jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh AGF yaitu Asian Games ke-9 pada tahun 1982 di New Delhi akan tetap berlangsung dan diikuti oleh 34 anggota NOCs (*National Olympic Committee*).²⁵ Pada tahun 1962 Pergelaran Asian Games ke-4 diadakan di Indonesia diikuti oleh 12 negara di Asia dengan 13 cabang olahraga yang ditandingkan. Pada saat itu, Indonesia sebagai tuan rumah tidak mengundang tim dari Israel dan Taiwan yang merupakan anggota Federasi Asian Games.²⁶

²¹ Frederich S Pearson dan J Martin Rochester. 1998. *International Relations: The Global Condition in the Twenty-First Century*. New York: McGraw-Hill. h.127

²² *Ibid*. h.177-178

²³ Ambarwati & Subarno W. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing. h.131

²⁴ Ottawa Citizen. 1981. "Israelis facing Asian ban" diakses [online] <http://www.ocasia.org/Game/NewDelhi> pada: 8 Agustus 2018

²⁵ *Ibid*, History OCA.

²⁶ Fahmiranti Widazulfia. 2018: Liku-liku Asian Games 1962 diakses [online] <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/07/20/mengenang-asian-games-1962> pada: 13 Agustus 2018

1.13.2.2 Responsibility to Protect

Dasar pijakan dari teori *Responsibility to Protect* (R2P) merupakan sekumpulan prinsip yang menyediakan bingkai kerja (framework) untuk melakukan tindakan bagi komunitas internasional yang memiliki tujuan pencegahan atau menghentikan kekejaman missal. Dengan adanya *World Summit* 2005 yang dihadiri oleh para kepala negara kepala pemerintahan anggota PBB yang secara resmi mengadopsi prinsip “tanggung jawab untuk melindungi” umat manusia dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁷ R2P adalah tentang tanggung jawab untuk bertindak. Tanggung jawab untuk bertindak ini jatuh kepada komunitas internasional ketika negara itu sendiri tidak ingin atau tidak mampu melakukan hal yang dalam kasus ini adalah untuk melindungi warganya. R2P merupakan ekspresi perubahan norma kedaulatan negara dan telah memberi jalan bagi revolusi hak asasi manusia serta memberikan implikasi pada keseluruhan perdebatan intervensi kemanusiaan.²⁸

Dalam pandangan Asian Games Federation, Asian Games tak boleh sekalipun dipisahkan dari isu-isu geopolitik yang berkecamuk di wilayah Asia, terutama wilayah anggota-anggotanya dan dimanapun di atas planet bumi untuk mengusir imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme dari tanah

²⁷ The Stanley Foundation. 2010. *Implementing Responsibility to Protect*. New York: Tarrytown House Estate & Conference Center.

²⁸ Yayan M Yani, Montratama, Ian., Mahyudin, Emil. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing. h.101-102

kedaulatannya masing-masing.²⁹ Maka itu Indonesia melakukan solidaritas bersama negara-negara Timur Tengah dalam mendukung Palestina dan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang sedang mengalami konflik perang Arab-Israel pada tahun 1960an.³⁰ Pada konflik itu, Israel, Inggris, dan Perancis sedang melakukan serangan ke Mesir dimana mereka ingin merebut Terusan Suez demi kepentingan militer dan politik lanjutan kemerdekaan Israel.

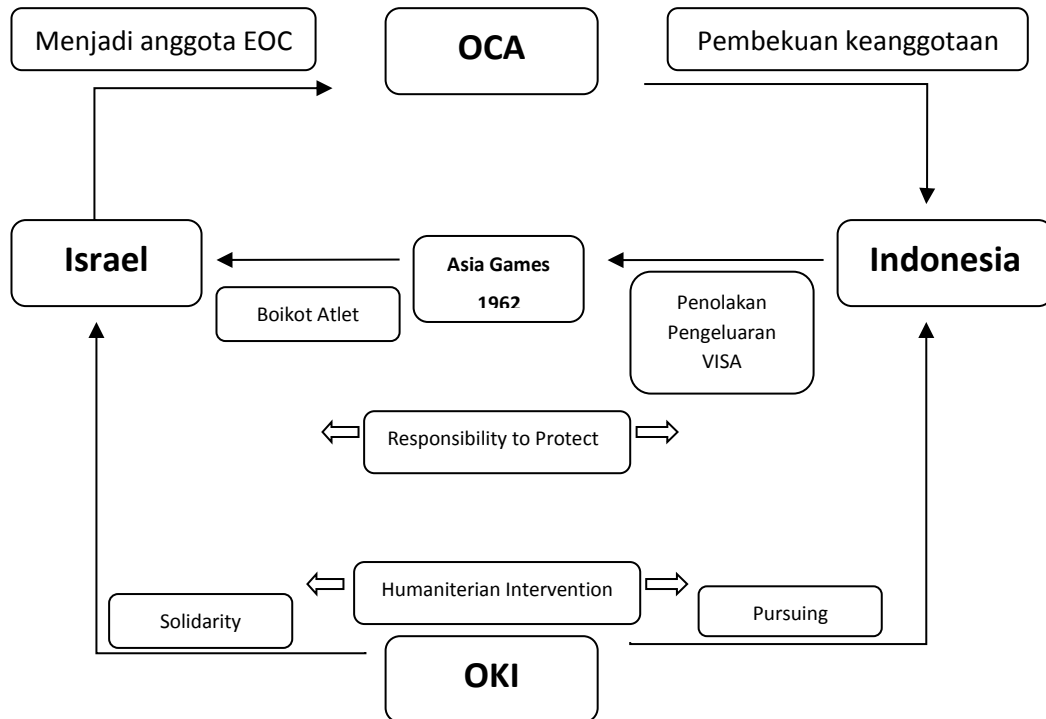
Respon Indonesia pada perhelatan Asian games ke IV itu adalah dengan tak bersedia mengeluarkan visa untuk kontingen dari Taiwan dan Israel sebagai respon atas tindakan Israel kepada Palestina. Alasannya, seperti dikemukakan Sukarno dengan tegas: Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok.³¹ Saat itu, negara-negara Arab sedang bersengketa dengan Israel yang ditopang Barat. Indonesia dan negara-negara Arab melihat hal ini sebagai bentuk penindasan negara-negara Old Established Forces (Oldefos) terhadap New Emerging Forces (Nefos).

²⁹ Principals and Objectives diakses [online] <http://www.ocasia.org/AboutUs/Index> pada 8 Agustus 2018

³⁰ Taufik Abdullah. 2013. *Soekarno "membongkar sisi lain Putra Sang Fajar*. Jakarta: Kompas. h.78

³¹ *Ibid.* h.79

1.14 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran kebijakan Indonesia Pada Asian Games Terhadap Israel

Indonesia dalam masalah ini mengambil kebijakan luar negeri dengan tidak mengeluarkan visa bagi kontingen atlet Israel yang pada kesempatan ajang Asia Games 1962 Indonesia menjadi tuan rumah.³² Alasannya, seperti dikemukakan Sukarno dengan tegas bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan negara-negara Arab.³³ Adanya isu ini menjadi perhatian bagi negara Indonesia,

³² Sudharmono. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. h.217

³³ *Ibid.* h.218

sehingga terdorong untuk melakukan sebuah tindakan sebagai R2P dalam *humanitarian intervention*.

1.15 Hipotesis

Hipotesa dalam penelitian ini ialah Indonesia dalam masalah ini mengambil kebijakan luar negeri dengan tidak mengeluarkan visa bagi kontingen atlet Israel berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap tindakan Israel yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran hak asasi manusia kepada negara-negara Arab. Kebijakan ini diambil oleh Indonesia karena Indonesia memiliki ideologi yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Israel dan merasa keamanan dunia juga menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai dasar Indonesia untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Namun dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki, Indonesia mencoba mengambil kesempatan sebagai tuan rumah ajang olahraga Asian Games 1962 sebagai tempat untuk mengimplementasikan *soft power* kebijakan politik luar negerinya.

1.16 Metode Penelitian

1.16.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.16.1.1 Humanitarian Intervention

Definisi konseptual intervensi kemanusiaan merupakan salah satu konsep yang kerap dipakai dalam studi keamanan ketika konflik terjadi pada negara disuatu kawasan. Intervensi kemanusiaan secara umum memiliki makna adanya campur tangan urusan dalam negeri suatu negara dengan cara paksa untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aktor negara, kelompok negara, atau

organisasi internasional.³⁴ Pengertian intervensi adalah aktifitas yang dilakukan oleh negara atau kelompok negara dan organisasi internasional yang mana mereka turut serta dalam urusan domestik negara lain dengan menggunakan “tekanan”. Dicitrakan dengan memiliki awal dan akhir serta tidak membutuhkan legalitas hukum dan disisi lain dapat juga merusak pola kesepakatan dalam hubungan internasional.³⁵

Definisi operasional dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana Indonesia merasa harus melaksanakan kebijakan pada kesempatan dimana Indonesia menjadi tuan rumah di Asian Games 1962. Kebijakan ini diambil Indonesia sebagai respon terhadap perang Israel-Arab. Dengan kebijakan yang diambil sebagai respon dan dampak yang muncul dari berbagai subjek terkait setelah keputusan yang diambil oleh Indonesia.

1.16.1.2 Soft Power

Morgenthau mendefinisikan konsep *power* dalam politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain dan juga digunakan sebagai kontrol atas kekuasaan pihak lain, bahkan bisa melalui kekerasan psikologis yang tidak kentara sekalipun.³⁶ Joseph, Nye juga mengemukakan sebuah ide mengenai konsep *soft power* yang merupakan sebuah bentuk baru dari *power* kemampuan suatu pihak untuk mengarahkan pihak lain dan mengikuti kemauan pihak pertama tanpa tekanan yang bersifat fisik.³⁷

³⁴ Graham Evans & Jeffrey Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relation*. London: Penguin BooksGroup. h.231

³⁵ Yayan. Montratama, Ian., Mahyudin, Emil. *Pengantar Studi Keamanan*. h.94

³⁶ Morgenthau. 1973. *Politics Among Nations*. New York: Prentice Hall. h.9

³⁷ Joseph S Nye dan Robert O Keohane. 2004. *Power and Interdependence*. New York: Longman. h.55-70

Hal ini terkait dengan upaya untuk mencari simpati dari negara lain, agar mau mengikuti kemauan dari negara yang mengimplementasikan *soft power*. Indonesia mencoba untuk melakukan *pursuing* negara negara peserta Asian Games dengan berharap dukungan negara lain sebagai respon atas perilaku Israel yang melakukan kekerasan terhadap Palestina.

1.16.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif*. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa pada masa sekarang, dengan mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data dari peristiwa tersebut, lalu fenomena tersebut dapat diselidik dengan melihat korelasi satu faktor dengan faktor lain.³⁸ Penelitian yang menggunakan format deskriptif juga bertujuan menggambarkan secara ringkas berbagai kondisi dan variabel yang menjadi objek penelitian. Dengan memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai variabel memungkinkan dapat amat mendalami data dan mudah untuk menjelaskan variabel terkait.³⁹

1.16.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam jangka waktu antara tahun 1954 dimana awal mula Israel melakuakn perang terhadap Palestina dan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang sedang mengalami konflik perang Arab-Israel pada tahun 1960an hingga tahun 1963 dimana awal mula langkah Indonesia memberikan

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

³⁹ M Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. h.48

respon politik terhadap OCA dengan mengadakan GANEFO sebagai tandingan Asian Games ke-IV tahun 1962.

1.16.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana analisis kualitatif melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari pengumpulan data sekunder yang sudah dikategorikan untuk mendapatkan pola hubungan, tema, serta kemudian dianalisa melalui reduksi data yang disajikan.⁴⁰ Reduksi data merupakan proses analisa data dengan memilih hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang nantinya akan memunculkan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁴¹

1.16.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan studi kasus dan dokumen atau pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu serta melalui bahan-bahan seperti buku teks, jurnal, surat kabar dan lainnya.⁴² Data kualitatif dengan metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan

⁴⁰ Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. h.12

⁴¹ M Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. h.282

⁴² Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. h.52-53

untuk menelusuri data historis. Pada penelitian sejarah, studi kasus dan dokumen ataupun pustaka menjadi memiliki peran yang amat penting dalam penelitian.⁴³

1.16.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis dan landasan teoritik, metode penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, hipotesis, tipe dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan;
- Bab II merupakan deskripsi akar permasalahan perang negara-negara Arab dengan Israel dengan gambaran umum sejarah serta perkembangan aktivitas Israel dalam ajang olahraga Asia Games. Permasalahan dan kebijakan yang diambil Indonesia untuk konflik Arab-Israel dalam hal yang mencakup bagaimana upaya pemboikotan atlet dari negara-negara Arab. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel bebasnya adalah mengenai penyelenggaraan GANEFO (*Games of The New Emerging Forces*) dalam Politik Luar Negeri Indonesia;
- Bab III adalah penjelasan terkait peran Indonesia dalam dimana kebijakan Indonesia mempengaruhi respon OCA dalam kasus ini. Uraian

⁴³ Kartono Kartini. t.th. *Pengantar Metodologi esearch Sosial*. Bandung: Alumni. h.170

atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep dan teori yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Hingga akhirnya Israel mengambil kebijakan untuk berpindah keanggotaan;

- Bab IV merupakan bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.